

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR**  
(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72  
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Dinas di Provinsi Jawa Timur)

**TESIS**

Untuk memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S2

Program Pasca Sarjana  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Konsentrasi : Kebijakan Publik



Oleh :

IGA WAHYUDI FIRMANSYAH  
23072000012

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR**

(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72  
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Dinas di Provinsi Jawa Timur)

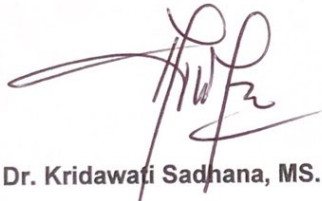
**Tesis ini telah disetujui  
Tanggal :**

.....

Oleh :

**IGA WAHYUDI FIRMANSYAH  
23072000012**

Pembimbing I



**Dr. Kridawati Sadhana, MS.**

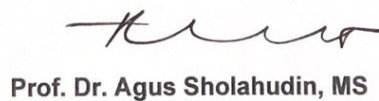
Pembimbing II



**Dr. Roos Widjajani, M.Si**

**Mengetahui :**

Ketua Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Merdeka Malang



**Prof. Dr. Agus Sholahudin, MS**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR**  
(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun  
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta  
Tata Kerja Dinas di Provinsi Jawa Timur)

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

Tanggal : .....

Susunan Dewan Penguji

Ketua



**Dr. Kridawati Sadhana, MS.**

Anggota Penguji




**Prof. Dr. Agus Sholahuddin, MS.**

Sekretaris



**Dr. Roos Widjajani, M.Si**



**Dr. Budhy Prianto, M.Si.**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister

Tanggal :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Merdeka Malang



**Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak, CA.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Iga Wahyudi Firmansyah  
NIM : 23072000012  
Program Studi : Megister Administrasi Publik  
Judul Tesis : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK)  
PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Implementasi Kebijakan  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas  
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Provinsi Jawa Timur)

Meryatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan hasil plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 31 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Iga Wahyudi Firmansyah

## **ABSTRAK**

**IGA WAHYUDI FIRMANSYAH, NIM : 23072000012, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (Dp3ak) Provinsi Jawa Timur (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Provinsi Jawa Timur), TESIS, Pembimbing I Dr. Kridawati Sadhana, MS, Pembimbing II Dr. Roos Widjajani, M.Si, Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana. Universitas Merdeka Malang.**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Upaya pemulihan Ekonomi untuk menumbuhkan kembangkan potensi dan peran perempuan dalam semua dimensi kehidupan, utamanya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kemampuan kaum perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana dan kendala apa saja implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang digambarkan secara rinci lewat wawancara dengan para informan. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan model Participatory Rural Appraisal (PRA). Yang terdiri dari Penjajakan/Pengenalan Kegiatan, Perencanaan Kegiatan, Pemantauan Kegiatan, Pelaksanaan/Pengorganisasian Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan. Terdapat 2 macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara, data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dengan baik menjadi perangkat informasi yang bisa memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur sudah berjalan lancar dan memenuhi 5 indikator implementasi kebijakan dimulai dari penjajakan/pengenalan, Perencanaan, Pemantauan, Pelaksanaan dan Evaluasi menunjukkan hal yang positif. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan adalah dangkalnya tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan, Keterbukaan dalam koordinasi dalam pemerataan tersebarnya informasi dalam pengambilan keputusan, keterbatasan anggaran kegiatan menjadi hambatan yang signifikan, keterbatasan kewenangan DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam menentukan sasaran, dan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kriteria menjadi hambatan untuk mencapai tujuan pelatihan Untuk kedepannya diharapkan kepada pimpinan agar dapat memperhatikan setiap kekurangan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

**Kata kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Korban Kekerasan**

## **ABSTRACT**

*IGA WAHYUDI FIRMANSYAH, NIM: 23072000012, Empowerment of Women Victims of Violence at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population (Dp3ak) of East Java Province (Policy Implementation Study Based on Governor Regulation Number 72 of 2023 concerning Position, Organizational Structure, Job Description and Functions and Work Procedures of Departments in East Java Province), TESIS, Supervisor I Dr. Kridawati Sadhana, MS, Supervisor II Dr. Roos Widjajani, M.Si, Master of Public Administration Study Program. Postgraduate Program. Merdeka University of Malang.*

*Violence against women is a social phenomenon that continues to this day.. Economic recovery efforts to develop the potential and role of women in all dimensions of life, especially women's empowerment through increasing the ability of women. The purpose of this study is to describe and analyze how and what obstacles are the implementation of the policy for Empowering Women Victims of Violence at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population (DP3AK) of East Java Province. The method used in this research is qualitative which is described in detail through interviews with informants. This research uses the empowerment theory of the Participatory Rural Appraisal (PRA) model. Which consists of Exploration / Introduction of Activities, Activity Planning, Activity Monitoring, Activity Implementation / Organization, and Activity Evaluation. There are 2 types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. The data is analyzed descriptively qualitatively, namely by the way, the data that has been obtained from the results of observations, interviews, and documentation is processed properly into a set of information that can obtain conclusions. The results showed that the implementation of the policy of empowering women victims of violence based on Governor Regulation Number 72 of 2023 at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population (DP3AK) of East Java Province has run smoothly and fulfills 5 indicators of policy implementation starting from exploration / introduction, planning, monitoring, implementation and evaluation showing positive things. The inhibiting factors for the implementation of policies to empower women victims of violence are the shallow stages of monitoring and evaluation of activities, openness in coordination in equal distribution of information in decision making, limited activity budgets are a significant obstacle, the limited authority of the DP3AK of East Java Province in determining targets, and training participants not in accordance with the criteria are obstacles to achieving training objectives In the future, it is hoped that the leadership will be able to pay attention to any shortcomings at every stage of implementing activities to empower women victims of violence.*

**Keywords: Implementation, Empowerment, Victims of Violence**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan kesehatan dan keberkahan, sehingga penyusun diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan tesis yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Merdeka Malang dengan judul **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR** (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Provinsi Jawa Timur)” dapat selesai dengan lancar. Pengetahuan dan pengalaman yang berharga penulis dapatkan dalam proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih tak berhingga juga dihaturkan kepada beliau-beliau yang berperan penting dalam penyusunan tesis ini.

1. Dr. Prihat Assih S.E., M.Si. A.K., CSRS selaku Rektor Universitas Merdeka Malang ;
2. Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak.,CA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang;
3. Bapak Prof. H. Agus Sholahudin, MS. Selaku Ketua Program Studi S2 MAP Universitas Merdeka Malang dan Ibu Dr. Roos Widjayani, M.Si sebagai Sek. Program Studi selama *study* di pendidikan Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang;
4. Ibu Dr. Kridawati Sadhana, MS., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Praptining Sukowati, SH., M.Si., Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing dan mengingatkan untuk menyelesaikan tesis;

5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang diperlukan untuk penulisan ini;
6. Ayahanda & Ibunda yang saya hormati dan kagumi Bapak Mathari dan Almh. Ibu Eka Yuni Purwanti yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang;
7. Istri dan anak tercinta Nindya Regyna Praja, S. Tr.IP dan Albirru Rafeayza Asshauqi atas segala perhatian, motivasi dan doanya serta anakku tercinta Albirru Rafeayza Asshauqi yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah;

Penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti.

Malang, .....2025

Iga Wahyudi Firmansyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Teori .....	8
1. Kebijakan Publik .....	8
2. Implementasi Kebijakan Publik .....	10
3. Konsep Pemerintah Daerah Provinsi .....	19
4. Konsep Perlindungan Anak dan Kependudukan .....	23
5. Konsep Gender .....	24
6. Pemberdayaan.....	29
7. Pemberdayaan Perempuan.....	31
8. Konsep Kekerasan.....	33
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 .....	37
B. Penelitian Terdahulu .....	39
C. Kerangka Konsep Penelitian.....	44
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Rancangan Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian .....	46

C. Lokasi Penelitian .....	47
D. Sumber Data .....	50
E. Informan Penelitian .....	51
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
G. Teknik Analisa Data .....	55
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	58
1. DP3AK .....	58
a. Struktur Organisasi .....	58
b. Tugas Pokok dan Fungsi .....	60
c. Kewenangan .....	61
d. Wilayah Kerja .....	64
e. Masalah Korban Kekerasan Tahun 2024 .....	66
B. Penyajian Data .....	69
1. Implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	69
a. Penjajakan/Pengenalan Kegiatan .....	70
b. Perencanaan Kegiatan .....	74
c. Pemantauan .....	79
d. Pelaksanaan/Pengorganisasian Kegiatan .....	83
e. Evaluasi Kegiatan .....	88
2. Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	93
a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur.....	93
b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur.....	95
C. Analisis Hasil Penelitian .....	97
a. Penyederhanaan Data Hasil Wawancara .....	85
b. Tabel Kategorisasi – Hubungan Antar Kategori .....	109
c. Pembahasan Kategori Dengan Teori Utama .....	111

1. Implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	111
a. Penjajakan/Pengenalan Kegiatan .....	111
b. Perencanaan Kegiatan .....	113
c. Pemantauan .....	114
d. Pelaksanaan/Pengorganisasian Kegiatan .....	115
e. Evaluasi Kegiatan .....	117
2. Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	118
a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur.....	118
b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DP3AK Provinsi Jawa Timur.....	121
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Tabel Data kekerasan pada perempuan di Jawa Timur .....	3
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	34
3.1 Tabel Data Informan Penelitian.....	51
4.1 Tabel Kewenangan DP3AK .....	62
4.2 Tabel Data Penanganan Kasus Kekerasan Kewenangan Provinsi Jawa Timur .....	66
4.3 Tabel Rekap Penanganan Kasus Kekerasan Melalui POS SAPA di UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	67
4.4 Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga .....	69
4.5 Tabel Coddling/ Penyederhanaan Hasil Wawancara .....	98
4.6 Tabel Kategori/Hubungan Antar Coddling.....	109

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Gambar Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	14
3.1 Gambar Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif .....	48
4.1 Gambar SOTK DP3AK .....	59
4.2 Gambar Wawancara dengan Sekretaris DP3AK Provinsi Jawa Timur ....	71
4.3 Gambar Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga.....	74
4.4 Gambar Perencanaan Kegiatan pelatihan perempuan korban kekerasan yang direalisasikan .....	76
4.5 Gambar Pemantauan dokumen persiapan pelatihan korban kekerasan .....	80
4.6 Gambar Wawancara dengan Analis Ahli Muda .....	81
4.7 Gambar Wawancara dengan Analis Perlindungan Perempuan.....	84
4.8 Gambar Pelaksanaan pelatihan perempuan korban kekerasan .....	85
4.9 Gambar Wawancara dengan Pengelola Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.....	86
4.10 Gambar Wawancara dengan Korban Kekerasan .....	87
4.11 Gambar Wawancara dengan Fungsional Penyuluh Hukum .....	89